

## RETRIBUSI - PERDA – PENCABUTAN

2012

PERDA NO.8, LD. 2012/NO.8, 7 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG RETRIBUSI IZIN TEBANG KAYU RAKYAT DAN ATAU PENERBITAN SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN (SKSHH) ATAU SURAT ANGKUT KAYU MILIK (SAKM), RETRIBUSI PELAYANAN ADMINISTRASI, PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI PENGGUNAAN JALAN KAWASAN TAMBANG GALIAN GOLONGAN C RUAS PREBUTAN-SALAMSARI DI KABUPATEN MAGELANG, RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI, RETRIBUSI IZIN USAHA PARIWISATA, RETRIBUSI PERIZINAN KETENAGAKERJAAN, RETRIBUSI IZIN PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C, RETRIBUSI IZIN PENYELENGGARAAN PELAYANAN BIDANG KESEHATAN, RETRIBUSI IZIN PENGGILINGAN PADI DI KABUPATEN MAGELANG, RETRIBUSI IZIN USAHA ANGKUTAN JALAN, DAN SEBAGIAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI, IZIN PEMAKAIAN TANAH PENGAIRAN ATAU TANAH JALAN KABUPATEN MAGELANG, DAN RETRIBUSI IZIN USAHA PERDAGANGAN SERTA RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG

- ABSTRAK :
- bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, beberapa Peraturan Daerah yang mengatur tentang retribusi dan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu dilakukan pencabutan; bahwa dengan ditetapkannya Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan sebagai Badan Layanan Umum Daerah maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, tarif pelayanan diatur dengan Peraturan Bupati, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang perlu dilakukan pencabutan;
  - Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007;
  - Menerangkan tentang pencabutan peraturan daerah kabupaten magelang tentang retribusi izin tebang kayu rakyat dan atau penerbitan surat keterangan sahnya hasil hutan (skshh) atau surat angkut kayu milik (sakm), retribusi pelayanan administrasi, pengelolaan dan retribusi penggunaan jalan kawasan tambang galian golongan c ruas prebutan-salamsari di kabupaten magelang, retribusi izin usaha industri, izin perluasan dan tanda daftar industri, retribusi izin usaha pariwisata, retribusi perizinan ketenagakerjaan, retribusi izin pertambangan bahan galian golongan c, retribusi izin penyelenggaraan pelayanan bidang kesehatan, retribusi izin penggilingan padi di kabupaten magelang, retribusi izin usaha angkutan jalan, dan sebagian peraturan daerah kabupaten magelang tentang izin usaha jasa konstruksi, izin pemakaian tanah pengairan atau tanah jalan kabupaten magelang, dan retribusi izin usaha perdagangan serta retribusi pelayanan kesehatan pada rumah sakit umum daerah muntilan kabupaten magelang;
- CATATAN :
- Peraturan daerah ini mulai berlaku pada Tanggal 30 Maret 2012;